DAERAH – KERJA SAMA

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 5, LD 2025/NO. 187, TLD NO. 97, 62 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

- ABSTRAK : - Demi mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat, fisik konstruksi dan pelayanan publik, serta menerapkan otonomi daerah, perlu adanya kebijakan kerja sama daerah yang dioptimalkan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Kerja sama ini penting untuk mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Perda ini diatur mengenai kerjasama daerah yang dimaksudkan sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah. Kerja sama daerah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mencari alternatif pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, ruang lingkup kerja sama daerah mencakup beberapa aspek utama yaitu arah, bentuk, mekanisme, kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi dari kerja sama itu sendiri. Perencanaan kerja sama daerah dilaksanakan setiap tahun oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas kerja sama. Proses perencanaan ini mencakup inventarisasi kebutuhan kerja sama, yang didasarkan pada usulan, identifikasi potensi dan/atau prioritas objek kerja. Bentuk kerja sama daerah antgara lain berbentuk kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tahapan antara lain persiapan, penawaran sinergi, penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja, persetujuan DPRD, penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Untuk mempercepat dan kelancaran proses kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, Bupati dapat menetapkan tim koordinasi kerja sama daerah dan sekretariat kerja sama. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kerja sama.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2025.
- Penjelasan : 11 Hlm.